

2. Program Perangkat Daerah yang menjadi prioritas

Tabel 4.2

PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN ISU STRATEGIS

P3KE	STUNTING	INFLASI	SPM	LAIN-LAIN
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2. Program Perekonomian dan Pembangunan	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3. Program Pemberdayaan Sosial
4. Program Pengembangan Perumahan	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4. Program Pengembangan Perumahan	4. Program Penanganan Warga Negara Migran dan Korban Tindak Kekerasan
5. Program Kawasan Permukiman	5. Program Pengembangan Perumahan	5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5. Program Penanggulangan Bencana	5. Program Rehabilitasi Sosial
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6. Program Kawasan Permukiman	6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		7. Program Penyuluh		7. Program Penanganan

P3KE	STUNTING	INFLASI	SPM	LAIN-LAIN
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pertanian	7. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bencana
8. Program Penanggulangan Bencana	8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8. Program Rehabilitasi Sosial	8. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
9. Program Pemberdayaan Sosial	9. Program Pengendalian Penduduk	9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	9. Program Penanganan Bencana	9. Program Perlindungan Perempuan
10. Program Rehabilitasi Sosial	10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		10. Program Urusan Penunjang	10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11. Program Pemberdayaan Sosial			11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
12. Program Penanganan Bencana	12. Program Rehabilitasi Sosial			12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
13. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	13. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			13. Program Perlindungan Khusus Anak
14. Program Penempatan Tenaga Kerja	14. Program Pengawasan Keamanan Pangan			
15. Program Hubungan Industrial	15. Program Pelayanan			

P3KE	STUNTING	INFLASI	SPM	LAIN-LAIN
16.Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penanaman Modal			
17.Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	16.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
18.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	17.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
19.Program Penanganan Kerawanan Pangan	18.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
20.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	19.Program Penyuluh Pertanian			
21.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.Program Administrasi Pemerintahan Desa			
22.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	21.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan			

P3KE	STUNTING	INFLASI	SPM	LAIN-LAIN
23.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Masyarakat Hukum Adat			
24.Program Penyuluh Pertanian	22.Program Informasi dan Komunikasi Publik			
25.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	23.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
26.Program Pendaftaran Penduduk	24.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
27.Program Pencatatan Sipil	25.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban			
28.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
29.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				

3. Program Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah

Tabel 4.3

PROGRAM BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Seluruh PD
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing meningkatnya kualitas pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing meningkatnya kualitas pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					saing meningkatnya kualitas pendidikan	
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Dinkes dan KB
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Dinkes dan KB
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Dinkes dan KB
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Dinkes dan KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	Dinas PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas PUPR
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya	Dinas PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					Infrastruktur Pelayanan Dasar	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	Dinas PUPR
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	Dinas PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	Dinas PUPR
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan	Dinas PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
				Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Ekonomi Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	Dinas PUPR
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	Dinas PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Dinas PUPR
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Disperkimta
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Disperkimta
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Disperkimta
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Disperkimta
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	Dinsos, PP dan PA
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	Dinsos, PP dan PA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	Dinsos, PP dan PA
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	Dinsos, PP dan PA
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	Dinsos, PP dan PA
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan	DPMTK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	DPMTK
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	DPMTK
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	DPMTK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah - Meningkatkan pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Dinsos, PP dan PA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Dinsos, PP dan PA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatn ya pengend alian Pertu mbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlind ungan Anak dalam Pembangu nan Daerah	Dinsos, PP dan PA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatn ya pengend alian Pertu mbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlind ungan Anak dalam Pembangu nan Daerah	Dinsos, PP dan PA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatn ya pengend alian Pertu mbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlind ungan Anak dalam Pembangu nan Daerah	Dinsos, PP dan PA
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan	Dispertahankan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Disperkimpta
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Disperkimpta
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan	Disperkimpta

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
				Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Ekonomi Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Disperkimpta
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Disperkimpta
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Disperkimpta
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DLH
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya Kualitas	Disdukcapil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
				Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya	Dinkes dan KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					saing Meningkatkan ya pengend alian Pertu mbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlind ugan Anak dalam Pembangu nan Daerah	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya pengend alian Pertu mbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlind ugan Anak dalam Pembangu nan Daerah	Dinkes dan KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya pengend alian Pertu mbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlind ugan Anak dalam Pembangu nan Daerah	Dinkes dan KB
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudny a infrastruktur yang Mendukung Pengemba ngan Ekonomi	Dishub
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Terwujudny a infrastruktur yang Mendukung Pengemba ngan Ekonomi	Dishub
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan ya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Diskominfo
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan ya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Diskominfo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan,	Disdaginkop dan UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					Perindustrian, Koperasi dan UKM	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan	DPMTK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	DPMTK
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	DPMTK
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	DPMTK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Mem perluas Lapangan Pekerjaan dan Penge ntasan Kemiskinan	DPMTK
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya Kualitas Pemuda dan Olah Raga	Disparpora
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Kualitas Pemuda dan Olah Raga	Disparpora
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Kualitas Pemuda dan Olah Raga	Disparpora

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan ya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Diskominfo
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan ya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Diskominfo
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dispusip
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dispusip

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
2	24	03	PPROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transform asi pelayanan publik Meningkatkan ya Kualitas Pelayanan Publik dalam Peny elenggaraa n Pemerint ahan Daerah	Dispussip
3			Urusan Pemerintahan Pilihan			
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatn ya Ketahanan Pangan dan Pertum buhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatn ya Ketahanan Pangan dan Pertum buhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatn ya Ketahanan Pangan dan Pertum buhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatn ya Ketahanan Pangan dan Pertum buhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispersihkan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, di	Disdaginkop dan UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
					Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan ya Pertumbuhan Ekonomi, di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Disdaginkop dan UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
4	01		Sekretariat Daerah			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transform asi pelayanan publik Meningkatkan ya Kualitas Pelayanan Publik dalam Peny elenggaraa n Pemerint ahan Daerah	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transform asi pelayanan publik Meningkatkan ya Kualitas Pelayanan Publik dalam Peny elenggaraa n Pemerint ahan Daerah	Sekretariat Daerah
4	02		Sekretariat DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transform asi pelayanan publik Meningkatkan ya Kualitas Pelayanan Publik dalam Peny elenggaraa n Pemerint ahan Daerah	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
5	01		Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bappeda
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bappeda
5	02		Keuangan			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPKAD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPKAD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bapenda
5	03		Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	BKPSDM
5	04		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	BKPSDM
5	05		Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bappeda
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
6	01		Inspektorat Daerah			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah
7			Unsur Kewilayahan			
7	01		Kecamatan Administrasi			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kecamatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kecamatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kecamatan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kecamatan
8			Unsur Pemerintahan Umum			
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya ketentra man dan ketertiban umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya ketentra man dan ketertiban umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya ketentra man dan ketertiban umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya ketentra man dan ketertiban umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Penanggung Jawab
1			2	3	4	5
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan ya ketentra man dan ketertiban umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5.2. PAGU INDIKATIF

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras akan diupayakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBN, sharing antara APBD Provinsi dan APBD Kota Singkawang, maupun melalui APBD Kota Singkawang. Besaran Pagu Indikatif untuk melaksanakan program tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Besaran Pagu Indikatif Program Tahun 2025

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	583.729.381.478	Seluruh PD
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	295.834.461.984	
1	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	81.010.745.791	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.475.350.479	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	139.452.192	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	395.943.120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	53.387.080.813	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.672.029.430	Dinkes dan KB
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	495.158.826	Dinkes dan KB
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	144.375.000	Dinkes dan KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	75.517.557	Dinkes dan KB
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.079.335.253	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.265.355.360	Dinas PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.479.903.400	Dinas PUPR
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	74.549.061	Dinas PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.036.094.683	Dinas PUPR
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.744.012.800	Dinas PUPR
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	14.391.402.543	Dinas PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	35.386.164.159	Dinas PUPR
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.208.662.213	Dinas PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.170.029.744	Dinas PUPR
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	185.209.713	Dinas PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.137.951.577	Dinas PUPR
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.050.304.027	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	900.000.000	Disperkimta
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.231.003.326	Disperkimta
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.846.000.000	Disperkimta
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.073.300.701	Disperkimta
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	628.108.755	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	362.139.646	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	258.604.242	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.364.866	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.678.887.345	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	137.600.000	Dinsos, PP dan PA
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	8.000.000	Dinsos, PP dan PA
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.096.375.617	Dinsos, PP dan PA
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	276.072.213	Dinsos, PP dan PA
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	160.839.515	Dinsos, PP dan PA
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	22.186.589.709	
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	480.337.688	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	150.000.000	DPMTK
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	190.285.777	DPMTK
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	25.051.911	DPMTK
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	115.000.000	DPMTK
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	450.000.000	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	110.000.000	Dinsos, PP dan PA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	75.000.000	Dinsos, PP dan PA
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	30.000.000	Dinsos, PP dan PA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	160.000.000	Dinsos, PP dan PA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	75.000.000	Dinsos, PP dan PA
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.497.000.000	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	761.000.000	Dispertahanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.445.000.000	Dispertahankan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	121.000.000	Dispertahankan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	170.000.000	Dispertahankan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	2.921.113.364	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	75.000.000	Disperkimpta
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.459.600.000	Disperkimpta
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	100.000.000	Disperkimpta
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	156.060.000	Disperkimpta
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	93.203.364	Disperkimpta
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.037.250.000	Disperkimpta
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	4.591.462.223	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	55.762.405	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	76.349.938	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	284.504.606	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	20.000.000	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.079.619	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	8.500.000	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.695.420	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.047.570.234	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	808.273.849	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	440.395.849	Disdukcapil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	109.878.000	Disdukcapil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	243.000.000	Disdukcapil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.000.000	Disdukcapil
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.455.000.000	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	346.000.000	Dinkes dan KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.090.000.000	Dinkes dan KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.019.000.000	Dinkes dan KB
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.226.970.173	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.078.986.533	Dishub
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	147.983.640	Dishub
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	2.462.664.935	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	606.958.277	Diskominfo
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.855.706.658	Diskominfo
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.398.052.309	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	145.364.452	Disdaginkop dan UKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	72.325.418	Disdaginkop dan UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	335.474.511	Disdaginkop dan UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	86.180.002	Disdaginkop dan UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	758.707.926	Disdaginkop dan UKM
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	1.713.612.194	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	140.000.000	DPMTK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	5.238.447	DPMTK
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.163.351.168	DPMTK
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	392.897.579	DPMTK
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.125.000	DPMTK
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.870.951.283	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	330.000.000	Disparpora
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.465.951.283	Disparpora
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000	Disparpora
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	178.537.452	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	178.537.452	Diskominfo
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	36.897.152	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.897.152	Diskominfo
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	370.611.447	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	204.611.447	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	91.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	550.000.000	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	550.000.000	Dispussip
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	80.105.640	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	75.000.000	Dispussip
2	24	03	PPROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	5.105.640	Dispussip
3			Urusan Pemerintahan Pilihan	13.160.003.436	
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	842.148.594	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	667.000.000	Dispertahankan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	79.125.706	Dispertahankan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.000.000	Dispertahankan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	21.022.887	Dispertahankan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	1.825.930.974	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	270.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	928.381.944	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	432.549.030	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5.411.507.843	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	507.304.599	Dispertahankan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.136.703.244	Dispertahankan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	962.000.000	Dispertahankan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	75.000.000	Dispertahankan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.500.000	Dispertahankan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	710.000.000	Dispertahankan
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2.586.021.930	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	40.000.000	Disdaginkop dan UKM
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.811.330.000	Disdaginkop dan UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	543.070.894	Disdaginkop dan UKM
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	96.621.036	Disdaginkop dan UKM
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	95.000.000	Disdaginkop dan UKM
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.494.394.095	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.322.899.682	Disdaginkop dan UKM
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	171.494.413	Disdaginkop dan UKM
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	41.453.694.487	
4	01		Sekretariat Daerah	28.656.274.905	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.003.782.390	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.652.492.515	Sekretariat Daerah
4	02		Sekretariat DPRD	12.797.419.582	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.797.419.582	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	24.949.031.713	
5	01		Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	2.038.639.364	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.252.833.364	Bappeda
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	785.806.000	Bappeda
5	02		Keuangan	14.689.151.949	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.167.933.300	BPKAD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	954.438.023	BPKAD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.566.780.626	Bapenda
5	03		Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	3.200.000.000	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.200.000.000	BKPSDM
5	04		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000.000	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.500.000.000	BKPSDM
5	05		Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	521.240.400	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
				2025	
1			2	3	4
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	521.240.400	Bappeda
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2.598.950.000	
6	01		Inspektorat Daerah	2.598.950.000	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.000.000.000	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	598.950.000	Inspektorat Daerah
7			Unsur Kewilayahan	10.968.749.300	
7	01		Kecamatan Administrasi	10.968.749.300	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.096.825.500	Kecamatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.850.852.907	Kecamatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	250.000.000	Kecamatan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	771.070.893	Kecamatan
8			Unsur Pemerintahan Umum	21.033.335.360	
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik	21.033.335.360	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	230.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	20.183.335.360	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	240.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 5.2
Besaran Alokasi Anggaran Wajib/ *Mandatory Spending*
Kota Singkawang Tahun 2025

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN TAHUN 2025	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1	Bidang Pendidikan	Rp 254.536.209.690	25,82%
2	Bidang Kesehatan	Rp 278.919.430.845	28,29%
3	Bidang Infrastruktur	Rp 148.938.137.790	15,11%
	TOTAL	Rp. 340.844.790.682	69,22%

Tabel 5.3
Besaran Pagu Berdasarkan Isu Strategis

NO.	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS					TOTAL
		STUNTING	KEMISKINAN	INFLASI	INVESTASI	SPM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	-	13.400.743.731,00	460.000.000,00	-	-	13.860.743.731,00
2	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	0,00
3	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	0,00
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	69.045.100,00	45.624.600,00	99.530.800,00	99.530.800,00	-	313.731.300,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	0,00
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	0,00
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	0,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		275.000.000,00			150.000.000,00	1.727.109.695,00
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	0,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS					TOTAL
		STUNTING	KEMISKINAN	INFLASI	INVESTASI	SPM	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	224.000.000,00	49.875.950.478,00	-	-	18.367.313.269,00	50.099.950.478,00
11	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	21.836.512.000,00	23.535.484.400,00	-	-	1.552.185.600,00	45.988.285.000,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.515.998.083,00	591.866.563,00	-	-	16.120.998.083,00	31.623.862.729,00
13	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	1.879.830.402,00	-	-	605.000.000,00	2.484.830.402,00
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	777.495.617,00	1.617.675.795,00	-	-	3.467.930.433,00	3.540.074.994,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	0,00
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	474.284.849,00	-	-	-	474.284.849,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	0,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	192.247.400,00	-	-	-	-	192.247.400,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	-	238.485.777,00	-	5.238.447,00	-	243.724.224,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	0,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS					TOTAL
		STUNTING	KEMISKINAN	INFLASI	INVESTASI	SPM	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	68.956.000,00	-	68.956.000,00
22	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	705.000.000,00	3.626.266.437,00	1.760.128.593,00	-	-	6.091.395.030,00
23	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	960.000.000,00	23.171.511,00	1.151.511.160,00	-	-	2.134.682.671,00
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	395.000.000,00	265.000.000,00
25	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	-	-	-	-	-	0,00
26	KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	-	-	-	-	-	0,00
27	KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	-	-	-	-	-	0,00
28	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	-	-	-	-	-	0,00
29	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	-	-	-	-	-	0,00

Tabel 4.2

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu	Peningkatan akreditasi dan standarisasi Pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu dan profesional	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	72,89	73,5	75,07		
					Angka Harapan Hidup	Persen	72,11	74,17	75	Kesehatan	Dinkes dan KB
					Persentase dari SPM Bidang Kesehatan	persen	62,76	100	100	Kesehatan	Dinkes dan KB
					Penurunan Stunting						
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	persen	85	90	100	Kesehatan	Dinkes dan KB

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persen	100	100	100	Kesehatan	Dinkes dan KB
				Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah UKBM yang mengalami pengembangan dan Peningkatan	persen	n/a	85	100	Kesehatan	Dinkes dan KB
	Meningkatnya kualitas pendidikan				Angka Harapan Lama Sekolah	Persen	12,92	12,95	13,50	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	8,19	8,43	8,43	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Optimalisasi akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	29,83	30,15	48,05	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan pendidikan inklusif		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	101,82	100	100,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	102,34	100	100,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	91,26	91,58	91,58	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	79,2	81,88	88,5	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI PAKET A	Persen	98,69	99,82	99,82	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs PAKET B	Persen	96	97,21	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Pendidikan yang di tamatkan jenjang SD/MI/Paket A	Persen	55,47	55,63	55,63	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Pendidikan yang di tamatkan jenjang SMP/MTS/Paket B	Persen	33,08	33,23	34	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,68	0,48	0	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	1,47	1,32	0,01	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dan Kebudayaan
					Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	100	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	Persen	112,54	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi bangunan baik	Persen	96,1	96,31	96,51	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Ruang Kelas SMP/MTS dalam kondisi bangunan baik	Persen	95,07	95,24	96,65	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rasio Ketersediaan SD/MI / penduduk usia 7-12 tahun	Angka	39,77	39,92	39,92	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rasio Ketersediaan SMP/MTS / penduduk usia 13-15 tahun	Angka	35,2	35,8	35,8	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B	Persen	57,14	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	48,39	55,91	56	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar	Persen	100	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi Kualitas S1/DIV jenjang SD/MI	Persen	90,38	93,1	93,1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Guru yang memenuhi Kualitas S1/DIV jenjang SMP/MTS	Persen	94,27	95,48	95,48	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI	Angka	523,26	535	600	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rasio guru SMP/MTS terhadap murid SMP/MTS	Angka	587,65	593	650	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rasio guru SD/MI terhadap murid per kelas	Angka	0,05	0,08	0,08	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Kebudayaan
					Rasio guru SMP/MTS terhadap murid per kelas	Angka	0,12	0,15	0,15	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya				Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	82,67	84,12	84,25	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan seni budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	Pembudayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya	Pengembangan kebudayaan		Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola	Persen	80	83	83	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Cakupan Pelaku keragaman budaya yang dibina (jumlah orang)	Persen	50	98	98	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	81,3	84,3	84,3	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Kelestarian Cagar Budaya	Persen	87	88,5	88,5	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan	Persen	70	71,5	80	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga				Persentase atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	61,71	70	70	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi	Pembinaan olahragawan secara berkelanjutan	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan kompetensi SDM keolahragaan	Persen	10	17	25	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaat	Persen	36	63	63	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	n/a	37	47	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	persen	n/a	37	0	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pengendalian 2q laqq pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Persen	52,72	54,32	54,50	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos, PP dan PA
					Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor	681,55	695	830,16	Pemberdayaan perempuan dan	Dinsos, PP dan PA

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	daerah									perlindungan anak	
					Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,55	1,59	1,15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes dan KB
		Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	12	12,70	17,70	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos, PP dan PA
		Peningkatan kualitas perlindungan dan kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dari kekerasan dan atau TPPO	Perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar	Persen	71	80	100	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos, PP dan PA
				Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos, PP dan PA
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan anak	Penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti	Persen	37	40	100	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos, PP dan PA

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keragaman dan karakteristik sosial budaya anak untuk memastikan anak menikmati haknya	Perlindungan khusus anak	Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif	Persen	69	90	90	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos, PP dan PA
				Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir	Persen	n/a	100	0	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos, PP dan PA
		Peningkatan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	Pengendalian Penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera	Pengendalian penduduk	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur	Persen	n/a	2	100	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes dan KB
				Pembinaan keluarga berencana (kb)	Rasio Jumlah Akseptor KB	Persen	n/a	90	100	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes dan KB
		Peningkatan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah PPKS	Persen	n/a	85	100	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes dan KB

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis untuk penurunan kemiskinan					Persentase pertumbuhan ekonomi	Persen	5,05	5,4	5,4		
					Inflasi	Persen	5,96	3,8	1,50		
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM				Volume usaha koperasi	Rp	253.625.219.385	283.625.219.385	283.625.219.385	Koperasi	Disdaginkop dan UKM
					Volume usaha UMKM	Rp	782.901.050.097	812.901.050.097	812.901.050.097	UKM	Disdaginkop dan UKM
		Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan kelembagaan serta SDM pelaku Koperasi dan UMKM	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	74,29	74,50	79,25	Koperasi, UKM	Disdaginkop dan UKM
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persen	n/a	11,42	34,56	Koperasi, UKM	Disdaginkop dan UKM
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	n/a	21,05	60,78	Koperasi, UKM	Disdaginkop dan UKM
				Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	7,40%	7,40	7,5	Koperasi, UKM	Disdaginkop dan UKM
				Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	Persen	n/a	2	2	Koperasi, UKM	Disdaginkop dan UKM

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	3,68	4,1	5	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
		Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri	Peningkatan kualitas sarana dan prasaran perdagangan	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting	Persen	74,24	82,00	81	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
				Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	Angka	n/a	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
				Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan	Persen	n/a	9	9	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
				Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alatukur, takar, timbangan dan perlengkapannya(UTTP) yang bertandasah yang berlaku	Persen	92,91	94,50	94,50	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
				Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	Persen	n/a	85	84	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
					Pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	4,58	4,62	4,62	Perindustrian	Disdaginkop dan UKM
			Peningkatan kapasitas pelaku	Perencanaan dan pembangunan	Persentase Pertambahan Jumlah industri kecil dan	Persen	9,18	9,75	9,75	Perindustrian	Disdaginkop dan UKM

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan		industri	industri	menengah						
				Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha	Persen	n/a	2,5	2,5	Perindustrian	Disdaginkop dan UKM
					Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	Persen	11,82	11,92	11,92	Pertanian dan Perikanan	Dispertahankan
		Peningkatan produksi sektor pertanian	Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi	Persen	n/a	100	100	Pertanian	Dispertahankan
					Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Persen	60	100	100	Pertanian	Dispertahankan
					Persentase peningkatan Jumlah Pemotongan hewan di RPH	Persen	11,9	14	14	Pertanian	Dispertahankan
					Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	0,4	0,7	0,7	Pertanian	Dispertahankan
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persen	n/a	80	0	Pertanian	Dispertahankan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Luasan Lahan Pertanian yang diawasi penggunaan sarana Pertanian	Persen	50	50	100	Pertanian	Dispertahankan
					Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	Persen	n/a	100	0	Pertanian	Dispertahankan
					Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak	Persen	n/a	55	0	Pertanian	Dispertahankan
				Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Dalam Mendukung Kemandirian Pangan	Persen	n/a	100	100	pangan	Dispertahankan
				Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Hewan/ternak	Persen	16,8	12	10	Pertanian	Dispertahankan
					Persentase Peningkatan kualitas pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	Persen	n/a	75	100	Pertanian	Dispertahankan
				Penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok tani Kelas Pemula yang meningkat skornya	Persen	n/a	30	100	Pertanian	Dispertahankan
				Perizinan Usaha	Persentase pertimbangan teknis	Persen	n/a	100	100	Pertanian	Dispertahankan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pertanian	yang dikeluarkan						
		Peningkatan produksi sektor perikanan	Pembangunan dan perbaikan prasarana perikanan	Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	5	9	100	Perikanan	Dispertahankan
				Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	10	16	100	Perikanan	Dispertahankan
				Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Pelaku Usaha Skala kecil yang dibina	Persen	n/a	80	0	Perikanan	Dispertahankan
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat pelanggaran di Peraliran umum	Pelanggaran	0	0	0	Perikanan	Dispertahankan
					Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	85,7	86,9	86,9	Pangan	Dispertahankan
		Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Diversifikasi pangan berkelanjutan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase konsumsi energi	Persen	92,8	95,6	96,50	Pangan	Dispertahankan
				Penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan	Persen	n/a	31	31	Pangan	Dispertahankan
				Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	90	92	Pangan	Dispertahankan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif				PAD sektor pariwisata	Persen	9,77	9,84	9,84	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi dalam keadaan kondisi baik	Persen	20	75	80	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20	20	20	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Pemasaran pariwisata	Persentase event pariwisata	Persen	100	100	100	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Persen	25	27	27	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	5,5	5,8	5,8	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan	Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen	5	5,75	11	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan Investasi (PMDN/PMA) di daerah	Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal	hak kekayaan intelektual							
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,63	7,8	7,5		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,86	70,51	70,51	Penanaman Modal	DPMTK
					Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67	4,33	4,33		DPMTK; Disdaginkop dan UKM; Dispertahankan; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim PM	Persen	n/a	13,00	96	Penanaman Modal	DPMTK
				Promosi Penanaman Modal	Bertambahnya Investor Baru di Kota Singkawang	Investor	100	100	100	Penanaman Modal	DPMTK
				Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	Persen	86,33	89	89	Penanaman Modal	DPMTK
				Pengelolaan Data Dan Sistem	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi	Persen	100	100	100	Penanaman Modal	DPMTK

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di kota Singkawang		Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal						
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Besaran perusahaan yang patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	21	24	24	Penanaman Modal	DPMTK
				Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja	Persen	60,42	63,45	90	Tenaga Kerja	DPMTK
				Peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor	Persentase Perusahaan yang telah memenuhi sarana Hubungan Industrial	Persen	56,68	59,16	90	Tenaga Kerja	DPMTK
				Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persen	0	40	100	Tenaga Kerja	DPMTK
				Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran Pencari Kerja yang dilatih lulus Uji Kompetensi	Persen	26,09	62,50	100	Tenaga Kerja	DPMTK
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	69,14	86	89,81	Sosial	Dinsos, PP dan PA
					Persentase Potensi Kesejahteraan Sumber Sosial (PSKS) yang telah di Berdayakan	Persen	20	60	60	Sosial	Dinsos, PP dan PA

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PPKS	Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	Sosial	Dinsos, PP dan PA
				Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Migran Korban Tindak kekerasan	Persen	100	100	100	Sosial	Dinsos, PP dan PA
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase Perlindungan dan jaminan Sosial Terhadap Fakir Miskin	Persen	71	74	74	Sosial	Dinsos, PP dan PA
					Persentase Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin	Persen	100	100	100	Sosial	Dinsos, PP dan PA
			Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PPKS	Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Skala Kota	Persen	100	100	100	Sosial	Dinsos, PP dan PA
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang,					Indeks infrastruktur daerah	Persen	58,67	70,7	70,7		
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	97,91	98,08	76,39	PERKIM	Disperkimta
					Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Persen	64,98	38,63	98.87%	PERKIM	Disperkimta

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan					Persentase penduduk berakses air minum	Persen	48,71	50,06	50,06	PUPR	Dinas PUPR
					Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	93,5	94,2	94,2	PUPR	Dinas PUPR
		Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	Persen	0	16,21	26,53	PERKIM	Disperkimta
					Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	Persen	0	11,36	11,34	PERKIM	Disperkimta
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana	Pengembangan perumahan	100	100	100	PERKIM	Disperkimta
					Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan	Persen	0	71,51	50

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sarana dasar pemukiman yang memadai	(PSU)	Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani						
			Peningkatan pengelolaan air bersih	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100	100	PUPR	Dinas PUPR
			Peningkatan pengelolaan sanitasi	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	3,37	4,48	4,5	PUPR	Dinas PUPR
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Perencanaan Sistem pengelolaan sampah regional	Persen	100	100	100	PUPR	Dinas PUPR
				Kawasan permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	Persen	35,02	61,37	2,78	PERKIM	Disperkimta
					Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di	Persen	0	75	43,48	PERKIM	Disperkimta

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Bawah 10 Ha)						
	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi				Persentase Jalan mantap	Persen	40,97	55,3	59,5	PUPR	Dinas PUPR
					Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang		59,84	3,66	1,95	PUPR	Dinas PUPR
					Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	73,52	77,41	82	PUPR	Dinas PUPR
					Persentase Kelancaran Lalu Lintas	Persen	100%	99,43	40	Perhubungan	Dishub
		Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas	Penyelenggaraan jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	38,42	40,12	45	PUPR	Dinas PUPR
				Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang layak	Persen	84,44	60,53	60,53	PUPR	Dinas PUPR
				Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase yang terbangun	Persen	n/a	2,13	2,13	PUPR	Dinas PUPR
				Pengembangan Permukiman	Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik	Persen	32,72	39,1	0	PUPR	Dinas PUPR
			Peningkatan Penanganan Banjir	Pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di	Persen	8,33	9,02	9,02	PUPR	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					WS Kab/Kota						
			Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung	Penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik	Persen	70,59	75	75	PUPR	Dinas PUPR
				Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Persen	70	75,1	75,1	Perhubungan	Dishub
					Persentase Ruas Jalan bermasalah yang Terawasi	Persen	15	30	30	Perhubungan	Dishub
					Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	Persen	42	57	57	Perhubungan	Dishub
					Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola	Persen	7,54	7,43	15,30	Perhubungan	Dishub
					Persentase Lampu PJU Terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang	Persen	42,72	48,9	48,9	Perhubungan	Dishub
					Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU	Persen	n/a	100	100	Perhubungan	Dishub
					Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat	Persen	n/a	80	0	Perhubungan	Dishub
					Indeks Kepuasan	Nilai	n/a	78	85,83	Perhubungan	Dishub

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					n	
				Pengelolaan penerbangan	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara	Dokumen		1	0	Perhubungan	Dishub
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola				Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,85	66,31	66,31	Lingkungan Hidup	DLH
					Timbulan sampah terkelola	Persen	95,98	100	100	Lingkungan Hidup	DLH
			Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	na	1	1	Lingkungan Hidup	DLH
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan RTH	Persen	0,43	0,5	1,5	Lingkungan Hidup	DLH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup	Persen	na	35	35	Lingkungan Hidup	DLH

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase dunia pendidikan / lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat propinsi dan nasional	Persen	na	22	22	Lingkungan Hidup	DLH
				Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	Persen	na	10	25	Lingkungan Hidup	DLH
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	Persen	na	7	7	Lingkungan Hidup	DLH
				Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang Lingkungan Hidup	Persen	100	95	95	Lingkungan Hidup	DLH
				Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun	Persentase pengelolaan limbah B 3 yang	Persen	76	79	79	Lingkungan Hidup	DLH

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	tertangani						
		Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana persampahan	Pengelolaan Persampahan	Cakupan penangan sampah	Ton/ Tahun	25.882,88	24.853,78	24.853,78	Lingkungan Hidup	DLH
			Peningkatan layanan persampahan		Cakupan pengurangan sampah	Ton/ Tahun	6.769,10	10.651,62	10.651,62	Lingkungan Hidup	DLH
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan				Ketaatan terhadap RTRW	Persen	96,24	98,19	98,19	PUPR	Dinas PUPR
		Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rencana tata ruang	Persen	14,29	85,71	85,71	PUPR	Dinas PUPR
				Penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang seharusnya ditata	Persen	8,3	14,35	14,35	PUPR	Dinas PUPR
				Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100	Pertanahan	Disperkimta
				Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk	Persen	50,00	100,00	100	Pertanahan	Disperkimta

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pembangunan	pembangunan						
				Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	Persen	0	78,94	0	Pertanahan	Disperkimta
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi	Persen	0	66,66	0	Pertanahan	Disperkimta
				Pengelolaan izin membuka tanah	Persentase Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Persen	76,39	91,57	0	Pertanahan	Disperkimta
				Penatagunaan tanah	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	Persen	5,0	24	8,15	Pertanahan	Disperkimta
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,37	70,2	84,50		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85,04	87,5	87,5	Dukcapil, Dispusip, Kecamatan Administrasi, Set DPRD	Disdukcapil, Dispusip, Kecamatan, Set. DPRD
					Nilai RB	Nilai	63,37	70,2	81,94	Sekretariat Daerah	SETDA
		Pemantapan sistem	Penerapan instrumen	Pemerintahan dan	Persentase Terlaksananya IKK	Persen	70	85	98	Sekretariat Daerah	SETDA

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
informasi		pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	pengendalian kualitas pelayanan publik	kesejahteraan rakyat	Oleh Perangkat Daerah						
					Persentase Tindaklanjut Perda	Persen	76,29	82	82	Sekretariat Daerah	SETDA
					Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Persen	0	60	85	Sekretariat Daerah	SETDA
				Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Persen	55,88	65	65	Sekretariat Daerah	SETDA
					Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah	Persen	89,65	92	95	Sekretariat Daerah	SETDA
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah	SETDA
			Peningkatan database kependudukan dan catatan sipil yang	Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	100	100	100	DUKCAPIL	Disdukcapil

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			valid dan update								
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil								
				Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	DUKCAPIL	Disdukcapil
				Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Peserta Yang Memahami Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	DUKCAPIL	Disdukcapil
					Persentase OPD yang telah menandatangani Perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan	Persen	100	100	100	DUKCAPIL	Disdukcapil
				Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Persen	100	100	100	DUKCAPIL	Disdukcapil
				Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	80	82	82	SET DPRD	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan fasilitas perpustakaan	Pembinaan perpustakaan	Persentase kunjungan ke perpustakaan	Persen	10,48	11,07	11,17	Perpustakaan	Dispuissip
					Persentase jumlah perpustakaan yang dibina	Persen	29,19	29,34	29,35	Perpustakaan	Dispuissip
					Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan digital	Persen	14,86	15,28	0	Perpustakaan	Dispuissip
				Pengelolaan arsip	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip Digital	Persen	10,35	17,24	17,24	Kearsipan	Dispuissip
					Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan	Persen	86,2	96,52	96,52	Kearsipan	Dispuissip
				Perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya diakuisisi	Persen	10,35	17,24	17,24	Kearsipan	Dispuissip
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan		Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan
				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam	Persen	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kelurahan	kegiatan pemberdayaan masyarakat						
				Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah				Indeks SPBE	Nilai	2,6	3,35	3,35	Kominfo, Persandian, Statistik	Diskominfo
		Penguatan kolaborasi berbagai pihak penyelenggaraan pemerintah		Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Data dan Informasi Publik	Angka	87,107 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	KOMINFO	Diskominfo
				Pengelolaan Aplikasi informatika	Persentase Penerapan Aplikasi e-Government	Angka	36	55	55	KOMINFO	Diskominfo
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi	Angka	57	63	63	Persandian	Diskominfo
				Penyelenggaraan statistik	Indeks Domain Proses Bisnis Statistik	Persen	1,9	2,63	2,75	Statistik	Diskominfo

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				sektoral							
					Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Nilai	59,73	65,85	73,47	Kepegawaia n	BKPSDM
			Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur	Kepegawaian daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN	Persen	100	100	100	Kepegawaia n	BKPSDM
					Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	99	0	Kepegawaia n	BKPSDM
					Persentase Pemenuhan Formasi pengadaan ASN	Persen	N/A	92	0	Kepegawaia n	BKPSDM
					Persentase ASN yang mengikuti Tugas Belajar	Persen	N/A	75	0	Kepegawaia n	BKPSDM
				Pengembangan sumber daya manusia	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Managerial	Persen	25,96	65	75	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
					Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persen	N/A	70	70	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
					Indeks SAKIP	Nilai	-	63,50	63,50	Perencanaa n	Bappeda
			Penyusunan perencanaan	Perencanaan, pengendalian	Persentase Konsistensi Program RPJMD /	Persen	100	100	100	Perencanaa n	Bappeda

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu	dan evaluasi pembangunan daerah	RPD ke dalam RKPD						
					Persentase Capaian Target Kinerja Indikator Program	Persen	100	100	100	Perencanaan	Bappeda
				Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian antar Dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD	Persen	91	100	100	Perencanaan	Bappeda
					Persentase Kesesuaian antar Dokumen Renja dengan RENSTRA	Persen	n/a	100	100	Perencanaan	Bappeda
					Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	-	75	75	Penelitian dan kelitbangan	Bappeda
					Indeks Inovasi Daerah	Persen	-	60	60	Penelitian dan kelitbangan	Bappeda
				Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Didiseminasikan	Persen	n/a	100	100	Penelitian dan kelitbangan	Bappeda
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Persen	n/a	66,67	66,67	Penelitian dan kelitbangan	Bappeda
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	Kuangan	BPKAD, Bapenda
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu	Persen	100	100	100	Kuangan	BPKAD
					Cakupan pencapaian	Persen	100	100	100	Kuangan	BPKAD

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah			penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target						
					Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	Keuangan	BPKAD
				Pengelolaan barang milik daerah	Persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	Persen	100	100	100	Keuangan	BPKAD
					Persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu	Persen	100	100	100	Keuangan	BPKAD
				Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10	10	21,80	Keuangan	Bapenda
					Indeks Integritas	Nilai	73,91	77	77	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya Fungsi Quality Assurance dan Consulting	Fasilitasi Pendampingan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal	Persen	96,2	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal :					Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					- BPK	Persen	92,2	94	94	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					- ITPROV	Persen	98,4	98	98	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase penyelesaian kasus pengaduan dan Pemeriksaan Khusus	Persen	100	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui pemberian Advis	Persen	100	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persen	100	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Cakupan Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Risiko Operasional	Persen	n/a	90	90	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi	Persen	6,90	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irban	Persen	6,90	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Indeks Toleransi	Nilai	6,583	6,66	6,66	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Peningkatan Ideologi dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter	Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	n/a	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			serta wawasan kebangsaan bagi Pelajar dan masyarakat	Kebangsaan							
				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	-	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	n/a	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	n/a	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	-	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum				Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja
					Indeks Risiko Bencana	Persen	125	110	110	TRANTIB	BPBD
		Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	100	100	100	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA (SPM)	Persen	100	100	100	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian RKPD 2025	Target Capaian RKPD Perubahan 2025	Urusan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			antar masyarakat								
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan pengurangan bencana	Pengembangan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana	Penanggulangan bencana	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	TRANTIB	BPBD
				Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Persen	100	100	100	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja